



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran No. 70 Komplek Balaikota Lantai 3 Ex. Lapangan Poliko
Kel. Kapalo Koto Dibalai Payakumbuh Telp. (0752)92052

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) TAHUN 2027

SKPD	:	BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN	:	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
KODE KEGIATAN	:	5. 02 .02. 2.03. 05
ANALISIS SITUASI	:	1. Data Pembuka Wawasan (data terpilah Gender) : a. Jumlah OPD di Kota Payakumbuh sebanyak 31 OPD, dimana akan terus dilakukan pembinaan kepada pelaksana keuangan dan penatusahaan serta pembuat laporan pertanggungjawaban terkait adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan.
	:	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender : a. Akses : 1. Pemahaman pelaksana pembuat laporan keuangan OPD yang belum merata sehingga perlu dilakukan pembinaan agar meratanya informasi peraturan terkait pengelolaan keuangan. b. Penyebab Internal : 1. Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab isu gender belum dianggap penting dan ditanggapi dengan serius. 2. Tenaga yang memberikan pembinaan didominasi oleh perempuan.

			c. Penyebab Eksternal : 1. Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara OPD, dimana OPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh. 2. OPD mengirimkan SDM yang tersedia dan mau melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan tanpa memperhatikan atau responsif gender.
RENCANA TINDAK			Kegiatan :
		Tujuan	Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
		Aktivitas	1. Melaksanakan pembinaan berupa bimbingan teknis maupun sosialisasi tentang peraturan pengelolaan keuangan terhadap pelaksana yang responsif gender Melakukan verifikasi data. 2. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender 3. Kegiatan yang telah dihimpun akan masuk ke dalam penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa rancangan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh.
		Sumber Daya (inputs)	Dana : sebesar Rp. 79.507.686,- SDM : Tim Pertanggungjawaban APBD Peralatan : computer, laptop, printer
		Output	Rumusan Kinerja : Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Indikator kinerja : Meningkatnya informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh.

ALOKASI SUMBER DAYA	:		Jumlah Anggaran Kegiatan :	Belanja untuk kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 79.507.686,-
			SDM	Dengan anggota yang mewakili Sekretariat Daerah, BKD, Inspektorat.
			Peralatan dan mesin	Komputer, laptop, printer
OUTCOMES			Rumusan Kinerja: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat Indikator kinerja : (1)OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dan dicantumkan pada kegiatan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD. (2)Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh). (3)Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Payakumbuh.	

Payakumbuh, Maret 2026
KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH



ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE
NIP. 19730319 199308 1 001